

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo. 1993. *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Liberty, Yogyakarta.
- Eddy O.S Hiariej. *Buku Materi Pokok Hukum Acara Pidana*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Jan Hendrik Raper. 1991. *Filsafat Politik Plato*. Rajawali. Jakarta
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta
- M.Karjadi dan R.Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia. Bogor
- M.Yahya Harahap. 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhaap Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

- Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim. 1982. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Rajawali. Jakarta
- Rawls, John. 1999. *Theory of Justice*. Harvard University Press. Cambridge.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3. Universitas Indonesia. Jakarta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta, CV, dan R&D*. Bandung.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Utrecht. 2000. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Lisa TR. 2022. *Disparitas sanksi pidana dalam jenjang pengadilan terhadap pelaku pengedaran narkoba di hubungkan dengan tujuan pemidanaan* (Skripsi Sarjana. Universitas Pasundan.)
- Dyah Devina Maya Ganindra. 2023. *Akibat hukum tidak dilaksanakannya pasal 56 kuhap terkait kewajiban hakim untuk menunjuk penasehat hukum bagi*

terdakwa dalam perkara pidana. Paper 2 Akibat tdk dilaksanakan pasal 56 KUHAP Devina.pdf (pn-sumedang.go.id).

Jurnal

Ahkam Jayadi. 2018. Peranan Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurisprudentie*. Volume 5 Nomor 2.

Angga dan Ridwan Arifin. 2018. Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*. Volume 4 No.2.

Andry Rahman Arif. 2015. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9 No. 1.

Asnatuti dan Ibrahim. 2018. Peran Penasehat Hukum Dalam Membantu Tersangka Pada Penyidikan Guna Terciptanya Proses Hukum Yang Adil. *Legalitas Jurnal Hukum*. Volume X No. 1.

Bambang Waluyo. 2015. Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hassanuddin Law Review*. Volume 1 No. 2.

Bambang Dwi Baskoro, Umi Falasifah, dan Sukinta. 2016. Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*. Volume 5 No. 3.

Beniharmoni Harefa. 2016. Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 1 No. 2.

Berlian Simarmata. 2022. Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Antara KUHAP Dengan RUU KUHAP Tahun 2012. *Fiat Iustitia Jurnal Hukum*. Volume 2 No. 2.

Benny Mika Dorma Saragih. 2024. Kewajiban Penyidik Menghentikan Proses Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Tentang Penetapan

- Tersangka Yang Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. Volume 4 No. 1.
- Hafiizh Fajar, Moch. Naufal Fadhil Akbar, dan Reza Sukma Dewi. 2023. Perlindungan Hukum Oleh Advokat Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana. *Volume 4 No. 2*.
- Hartono dan Maryanto. 2018. Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng. *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 1 No. 1.
- Jurgen Habermas. 1972. Knowledge and Human Interests. *The British Journal of Sociology*. Volume 23. Boston: Beacon Press.
- Lubis et al. 2023. Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial dan Sains*. Volume 3 No. 3.
- M. Noor Fajar Al Arif F & Pipih Ludia Karsa. 2021. Potensi Konflik Norma Terhadap Persidangan Teleconference Peradilan Pidana Sebagai Adaptasi Baru Akibat Virus COVID-19. *Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Volume 26 No. 3.
- Michele Aprilia dan Agus Riwanto. 2023. Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. *Res Publica*. Volume 7 No.3.
- Mulyadi. 2023. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmiah Hospitality* 399. Volume 12 No. 1.
- Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar. 2023. Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 20 No. 3.
- Putu Nia Rusmiari Dewi, I Made Wirya Darma. 2023. Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocent) Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

- Dampaknya Bagi Pemberitaan Media Massa. Wavahara Duta. Volume 18 No. 2.
- Purwanto, Syarifah Arabiyah, & Ivan Wagner. 2023. Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Akses Menuju Keadilan. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 5 No. 3.
- Rocky Marbun. 2019. Hukum Pidana Yang Instrumental: Upaya Legitimasi Kepentingan Melalui Pengetahuan Berbasis Kekuasaan (Studi Multidisipliner Terhadap Ekstasi Komunikasi Sebagai Tindak Pidana Melalui Simulacra). Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 1 No. 2.
- Rocky Marbun, Wibisono Oedoyo, Debby Monica Sinaga. 2021. Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi. Jurnal Usm Law Review. Volume 4 No. 1.
- Rusfandi dan Anita. 2022. Peranan Penasehat Hukum dalam Mendampingi Tersangka pada Proses Penyidikan. Jurnal Jendela Hukum. Volume 9 No. 2.
- Septiana Rahayu. 2023. Pengaruh Penerapan Hukum Pajak Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Buana Ilmu. Volume 8 No. 1.
- Siti Wulandari. 2020. Penahanan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Audito Comparative Law Journal. Volume 1 Issue 1.
- Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, dan Sukinta. 2016. Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Diponegoro Law Journal. Volume 5 No. 3.
- Yonna Beatrix Salamor. 2018. Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. Volume 2 No. 1.

E-Book

Bambang Waluyo. 2022. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Diakses melalui Google Books (https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=LA5zEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=9Nt4ykoirz&sig=YU1C11QtkxkTO2GJ74HmvuUo7CQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

Boris Tampubolon. 2019. *Akibat Hukum Jika Hak Tersangka/Terdakwa Atas Bantuan Hukum Tak Dipenuhi Harus Diatur Dalam Undang-Undang*. Diakses 20 Februari melalui. lbhmawarsaron.or.id (<http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwaatas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/>).

Sumber Internet

Lisa TR. (2022). *Disparitas sanksi pidana dalam jenjang pengadilan terhadap pelaku pengedaran narkoba dihubungkan dengan tujuan pemidanaan*. https://repository.unpas.ac.id/view/creators/Lisa_Tya_Rahma_Esadina_Ma==2019sum=3A181000118=3A=3A.html

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. 1983. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Sekretariat Negara. Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1993, 16 September. *Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (1994). Surat Edaran Jaksa Agung No. B-570/F/Fpk.1/9/1994 tentang penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Jakarta: Kejaksaan Agung.
- Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. 2005. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 162, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012, September 12. *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012: Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*. Jakarta: Sekretariat MA.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Jakarta: Sekretariat Negara.

DIREKTORI PUTUSAN

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/PID.Sus/2011, tanggal 5 November 2010
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/Pid.Sus/2014. tanggal 04 Agustus 2014
- Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 7/PID.B/2019/PN.BTA tanggal 09 November 2018

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 129/PID/2021/PT PLG, tanggal 06
Januari 2021